

Judul : RUU PFII sah jadi UU, DPR: perkuat keuangan nasional dan investasi
Tanggal : Jumat, 24 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU PFII Sah Jadi UU DPR: Perkuat Keuangan Nasional Dan Investasi



Mohamad Hekal

DPR mengesahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) jadi UU dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Belaid ini menjadi fondasi hukum pengembangan pusat keuangan internasional guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional secara global.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PFII sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal memaparkan, pembahasan regulasi aturan itu dimulai pada 2 Juli 2026 usai disetujui masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas).

Pembahasan di tingkat Panja diawali dengan mengumpulkan partisipasi publik lewat rapat dengar pendapat umum pada 6 sampai dengan 9 Juli 2026. "Tahapan dilanjutkan dengan pembahasan intensif pada 9 hingga 20 Juli, yang mencakup proses sinkronisasi serta finalisasi draf rancangan aturan," terangnya.

RUU PFII, kata Hekal, mengatur ketentuan umum mengenai definisi, asas, pembentukan, kedudukan, tujuan penyelenggaraan, serta kegiatan usaha di kawasan itu. Regulasi ini turut memuat aspek kelembagaan, dewan

pertimbangan, dewan, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan, hingga lembaga arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa.

Pengaturan lainnya mencakup status pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus beserta kewenangan mengadili dan hukum acaranya. Aturan itu ikut memuat fasilitas perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, hingga pemberian fasilitas kepastian bagi para pelaku usaha di kawasan.

Aturan itu juga menetapkan perlakuan perpajakan atas warisan serta penanaman modal awal di kawasan PFII. "Selain itu terdapat pula ketentuan hak dan kewajiban pelaporan administrasi. Juga, sanksi pelanggaran fasilitas perpajakan, sampai kemudahan khusus bagi pelaku usaha, tenaga ahli, maupun pihak terkait lainnya," jelasnya.

Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi Pemerintah atas selesainya pembahasan rancangan undang-undang itu secara lancar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran Pemerintah yang aktif selama proses pembahasan regulasi.

Penghargaan juga diberikan kepada segenap pimpinan serta anggota Komisi XI DPR yang telah menyelesaikan pembahasan RUU PFII hingga tahap pengambilan keputusan paripurna. Seluruh rangkaian proses itu berjalan dengan sangat lancar berkat kerja sama yang terjalin erat di antara semua pihak terkait. ■ PYB